

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah ketika saat ini sedang di hadapkan pada suatu kondisi dimana adanya sebuah tantangan yang menuntut pemerintah agar lebih kreatif dan berinovasi dalam melaksanakan kegiatan dalam agenda pemenuhan fasilitas dan hak masyarakat atau biasa disebut dengan pelayanan publik yaitu dengan mulai menerapkan dan melaksanakan segala fasilitas yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, dimana jika hal demikian di terapkan dan di laksanakan dalam proses kegiatan pelayanan publik maka akan menghasilkan sebuah kinerja yang lebih efektif dan efisien. Mengapa demikian karena memberikan pelayanan terhadap masyarakat merupakan hal yang sangat intens dan penting yang merupakan kewajiban pemerintah guna menciptakan pelayanan publik yang prima dan membentuk masyarakat yang sejahtera.

Teknologi informasi dan komunikasi atau kita sering menyebut nya dengan ICT (Information and Communication Technology) di era ini sangatlah penting untuk menunjang keberhasilan dalam sebuah kinerja organisasi. Elektronik pemerintahan atau bisa disebut juga pemerintahan digital merupakan sebuah jalan untuk memudahkan pemerintah dalam menjalankan hubungan dan interaksi kepada masyarakat , stakeholder itu sendiri, maupun pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Karena pada hakikatnya tujuan dari E-Government adalah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih berkualitas kepada masyarakat juga memberikan kesempatan terhadap masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam proses pemberian pelayanan publik yang prima. Dengan proses demikian kita bisa mengukur atau menilai proses kinerja pemerintah dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara inovatif guna mempermudah masyarakat untuk mengambil dan mengakses macam-macam bentuk informasi dan layanan pemerintah.

Song & Guan (2015) Kemudian E-Government juga merupakan sebuah jalan dalam memberikan solusi terhadap pelaksanaan sistem komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yang memiliki tujuan untuk memperbaiki efesiensi, transparansi , kualitas kebijakan publik, serta untuk menciptakan kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk perwujudan masyarakat yang ikut berperan aktif . E-Government atau elektronik pemerintahan memiliki manfaat yang sangat penting dalam pelaksanaan kinerja suatu organisasi dimana bisa di jadikan sebagai alat ukur transparansi sebuah organisasi yaitu :

1. Untuk mempublikasikan suatu kebijakan publik kepada masyarakat melalui sarana informasi dan komunikasi seperti lewat brosur, website, surat kabar, pusat informasi, liputan media masa, dan lain sebagainya.
2. Untuk memberikan informasi mengenai berita yang akan di sajikan kepada masyarakat seperti laporan berita acara kegiatan publik, susunan pengaduan , pelayanan sumber penyajian dan pengelolaan data, dan lain sebagainya.
3. Untuk menangani semua pengaduan, hambatan dan masalah publik seperti berita di daerah dan media masa setempat, penanganan informasi pada isu-isu kebijakan publik dan lain sebagainya.

Sumber berita merupakan sebuah aspek yang selalu bergandengan dengan lingkungan kinerja sebuah instansi, sehingga sumber berita merupakan aspek yang sangat pokok dalam pelaksanaan organisasi , disamping kekayaan hasil alam yang baik , finansial dan sumber daya manusia. Selain itu batas kemampuan seseorang untuk bisa mengolah data dan informasi yang sangat cepat menjadikan sebuah suntikan terhadap seseorang untuk menggunakannya dengan optimal teknologi dan sistem informasi. Pada kurun waktu saat ini teknologi dan sistem informasi merupakan suatu hal yang tidak bisa dijauhkan dari rutinitas aktifitas manusia dalam proses kehidupannya setiap hari.

Informasi diperlukan sebagai alat untuk membuat sebuah teknik yang digunakan agar pelaksanaan pada kinerja organisasi dapat mencapai hasil yang

maksimal, baik dalam perancangan maupun penilaian aktivitas organisasi. Sistem penilaian yang efektif dibutuhkan dalam proses pelaksanaan agar organisasi bisa terlaksana secara maksimal. Dengan demikian informasi dapat dijadikan sebagai alat bantu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya serta meningkatkan produktivitas anggotanya. Indonesia adalah salah satu negara yang belum bisa dikatakan negara maju mengapa demikian karena penduduknya yang terhitung memiliki jumlah sangat banyak sehingga menyebabkan persebaran penduduk yang kurang merata dari permasalahan demikian berikut masalah yang lainnya menuntut pemerintah agar dapat secepat mungkin berkegiatan mengeluarkan sebuah kebijakan untuk menghadapi masalah tersebut. Pemerintah dalam menghadapi permasalahan ini harus terus berusaha untuk mendapatkan data mengenai kependudukan di Indonesia secara jelas agar dapat membuat penempatan yang tepat untuk menanggulangi persoalan kependudukan baik di tingkat daerah ataupun pusat . Data tersebut dibutuhkan sebagai bahan pada suatu rencana dalam rangka pengendalian jumlah, pertumbuhan, dan pemerataan persebaran penduduk. Yang tertuang dalam UU Nomor 24 Tahun 2013 mengenai perubahan dari peraturan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Maka dalam setiap pengelolaan pendaftaran penduduk itu merupakan kewajiban pemerintah daerah, dimana pada pelaksanaannya dimulai dari yang paling dasar yaitu dari tingkat desa/kelurahan selaku proses pertama dalam penataan dan pembuatan pendaftaran penduduk. Maka pada proses pelaksanaannya agar berjalan dengan efektif dan efisien sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan yang maksimal

Diantara solusi untuk menyelesaikan persoalan mengenai pendaftaran penduduk yang akurat sesuai standar yang telah ditentukan maka pemerintah harus merumuskan, merencanakan, menetapkan suatu kebijakan melalui pengadaan program yang di sebut dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang dirancang berdasarkan ketentuan-ketentuan sesuai standar yang telah ditentukan yang memiliki fungsi khusus agar sistem yang digunakan berjalan

dengan baik dan juga dalam proses pelaksanaannya bisa berjalan dengan tepat dan cepat hal demikian bertujuan untuk memberikan keringanan beban tugas dari setiap pegawai juga menciptakan sebuah pelayanan yang nyaman dan tertib terutama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil .

Melalui Aplikasi SIAK dapat dijadikan sebuah jawaban dari persoalan kependudukan yang ada, dengan terdapatnya pengelolaan data secara online maka kekurangan-kekurangan dalam pengolahan data secara konvensional dapat diminimalisir . Beberapa manfaat yang dirasakan dari pelaksanaan SIAK yaitu, mempermudah dan mempercepat proses penginputan data dengan maksimal mengurangi data identitas penduduk yang bersifat ganda, serta terdapat data yang lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, pencegahan tindakan kriminal, penegakan hukum dan pembangunan demokrasi dan lainnya. Dalam pelaksanaannya di era globalisasi ini E-Government sudah tidak asing lagi di seluruh khalayak masyarakat umum khususnya di kalangan pegawai pemerintah hal demikian merupakan alat bantu untuk mempermudah dalam melaksanakan aktivitas tugas-tugas kerja mereka. Dari hasil data yang didapat oleh kementerian komunikasi dan informasi , juga sejumlah data dari studi polling indonesia yang bekerjasama dengan Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia menyatakan bahwa tercatat pada saat ini pengguna internet di indonesia mencapai 83,7 juta jiwa pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan di tahun 2019 yaitu sebanyak 171,17 juta jiwa pengguna internet di Indonesia. Dengan sistem pemanfaatan E-Government di harapkan kinerja pemerintah bisa berjalan dengan produktif, efektif, efisien, transparansi, dan akuntabilitas.

E-Government pada dasarnya dalam penerapan dan pelaksanaan di instansi-instansi pemerintah atau perusahaan swasta lainnya diperkuat oleh adanya Perpres Nomor 96 Tahun 2014 tentang rencana pitalebar Indonesia yang membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi . Perpres tersebut menjadikan bahan suntikan yang lebih kuat dalam sistem kerja suatu organisasi agar setiap proses kerja untuk dikaitkan dan

digunakannya sistem E-Government dengan demikian hasil kerja suatu organisasi bisa lebih mumpuni, yaitu menghemat dalam segi pembiayaan dan lebih efektif dalam pengelolaan waktu. Pelaksanaan dan pengembangan E-Government pada instansi pemerintah dilandasi dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 didalamnya menjelaskan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pedoman utama dalam penerapan dan pelaksanaan SIAK diatur dalam Permendagri Nomor 95 Tahun 2019 tentang penerapan, pelaksanaan dan pengelolaan SIAK.

Dari penjelasan diatas terlihat jelas bahwa dalam kinerjanya sebuah organisasi harus sungguh-sungguh bertanggung jawab atas tugas nya khususnya yang bersangkutan dengan pemberian layanan terhadap publik, yaitu dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang prima dan berkualitas agar tidak terjadi deskriminasi, pengelolaan data yang tidak akurat, dan permintaan publik yang belum terpenuhi sesuai perjanjian. Tetapi disamping itu juga pastinya ada kekurangan yang mungkin bisa terjadi dalam proses Pelaksanaan E-Government yang berkaitan dengan proses kinerja, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusianya yang belum berjalan maksimal hal demikian merupakan sebuah kejadian yang biasa terjadi dan mungkin diperlukan agar adanya perbaikan dan evaluasi secara maksimal agar kinerja kedepannya bisa lebih efektif dan efisien.

Dalam Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi SIAK Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya saya memperoleh sejumlah data tentang capaian kinerja , yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Indikator Sasaran	Sat	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	%
A	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja				
1	Nilai Evaluasi AKIP Disdukcapil	Skor	B	B	100
2	Maturisasi SPIP	Level	4	4	100
B	Meningkatnya Kualitas Pelayanan				

	Publik				
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78,5	81,43	103,73
C	Meningkatnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan				
1	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Berdasarkan Aplikasi SIAK	%	91	89,59	98,45
2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el)	%	98,75	97,86	99,09
3	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	50	67,94	135,88
4	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	%	82,5	96,91	117,40
5	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Aplikasi SIAK	%	45	45,47	101,04
6	Pengolahan Perubahan Data	%	62,06	66,29	106,82

(Sumber LAKIP Disdukcapil Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019)

Tabel di atas menunjukkan bahwasanya aspek-aspek pelayanan umum yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya berjalan stabil. Meskipun di bagian proses Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga Berdasarkan Aplikasi SIAK belum mencapai pada target yang telah ditentukan yaitu yang sebelumnya ditargetkan 91 baru terrealisasi 89,59. Begitupun Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) belum mencapai pada target yang telah ditentukan yaitu yang sebelumnya ditargetkan 98,75 baru terrealisasi 97,86. Kemudian dilihat dari Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan Aplikasi SIAK dikatakan masih rendah walaupun telah terrealisasi sesuai target yaitu baru mencapai nilai yang awalnya ditergetkan 45 baru terrealisasi 45,47 .

Menurut data awal yang peneliti dapatkan dari hasil observasi di lapangan penelitian bahwasanya beberapa penyebab dari tidak tercapainya program kerja sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu disebabkan dari faktor sumber daya manusia dan infrastruktur penunjang yang belum maksimal juga kurangnya kesadaran masyarakat akan penting nya dokumen kependudukan. Menurut data dan informasi yang didapat bahwasanya dalam penginputan data dari system manual ke system aplikasi SIAK sampai saat ini secara keseluruhan baru terrealisasi 20% sampai 40 % yang terinput ke system SIAK sedangkan dari 10 % nya berjumlah 1700.000 jiwa berarti masih tersisa 60% persen lagi yaitu berjumlah 10.200.000 jiwa yang data nya belum

terinput pada system SIAK hal demikian disebabkan karena kurangnya jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan.. Selanjutnya untuk fasilitas yang mendukung terlaksananya penerapan E-Government masih dikatakan belum maksimal yaitu dilihat dari sarana prasarana server komputer , jaringan komunikasi data yang belum memadai dan masih kurangnya sarana mobilitas untuk pelayanan jemput bola yaitu kendaraan keliling yang pada tahun 2019 ini baru tersedia 1 (satu) unit saja sehingga diharapkan kedepannya untuk adanya penambahan dan pelengkapan sarana prasarana yang menunjang termasuk untuk Unit Pelayanan Keliling. .

Dengan diterapkan dan dilaksanakannya konsep E-Government melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan), diharapkan memudahkan pegawai didalam memeberikan pelayanan terhadap masyarakat dan juga dapat mengolah data secara akurat sesuai standar yang telah ditetapkan. Namun kenyataannya dilapangan, masih ditemui sarana prasarana yang belum memadai dan proses kerja yang belum maksimal. Padahal hal demikian merupakan salah satu syarat yang teramat penting dalam melaksanakan proses Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Dengan demikian, dapat dipastikan pelayanan dan juga proses kerja di lapangan akan mengalami kendala. Penelitian ini dilaksanakan melalui hasil pengolahan data yang didapatkan, hasil dari observasi dan wawancara awal dengan sebagian pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dan sejumlah masyarakat serta hasil dari dimensi konteks, input dan proses.

Sehingga pada akhirnya di ambil suatu kesimpulan bahwasanya dalam proses kinerja pelayanan publik khususnya pada proses Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya masih ada proses pelayanan dan kinerja yang belum maksimal dengan kesesuaian target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu cakupan penerbitan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan aplikasi SIAK, cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) masih belum sampai

pada target yang telah ditentukan dan dari proses cakupan penerbitan Akta Kelahiran berdasarkan aplikasi SIAK masih terbilang rendah serta masih kurangnya sarana prasarana dan mobilitas yang menunjang. Dari itu maka harus adanya peningkatan dan evaluasi dalam kinerja tersebut untuk menjadi lebih baik, efektif dan efisien untuk kedepannya.

Setelah peneliti memaparkan mengenai masalah yang terjadi yaitu mengenai pentingnya Pelaksanaan E-Government pada proses pelayanan publik khususnya pada implementasi program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan maka dari itu peneliti tertarik untuk melanjutkan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: *“Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya “*.

1.2 Fokus Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka bisa diuraikan mengenai fokus masalah yang terjadi di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pelayanan melalui E-Government masih belum sampai pada tahap yang maksimal
2. Kurangnya sarana prasarana yang menunjang proses kinerja khususnya di bidang Pelayanan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya
3. Dari segi Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang ahli masih kurang.

1.3 Rumusan Masalah

Setelah memaparkan penjelasan di atas bahwasanya didapatkan sebuah persoalan yang teramat penting untuk dipelajari lebih mendalam maka dari itu peneliti merumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ?

2. Apa saja hambatan dalam Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Strategi apa yang digunakan dalam Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ?

1.4 Tujuan Penelitian

Dilihat dari uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui strategi yang digunakan dalam Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian mengenai Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya peneliti sangat mengharapkan adanya manfaat yang signifikan dan memiliki kegunaan secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - 1) Kegunaan secara teoritis adalah untuk menambah serta memperluas ilmu dan wawasan mengenai teori- teori , referensi- referensi pada jurusan administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan pembahasan pelaksanaan E-Government melalui aplikasi SIAK .

- 2) untuk di jadikan sebagai bahan referensi mahasiswa- wahasiswa selanjutnya yang tengah melaksanakan penelitian sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar sarjana pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Djati Bandung .
 - 3) Untuk dijadikan bahan evaluasi bagi para pegawai instansi yang dijadikan sebagai objek penelitian agar menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif dalam melaksanakan tugas nya.
2. Kegunaan Secara Praktis
- 1) Untuk mengembangkan potensi penulis dalam menulis karya ilmiah khususnya dalam penelitian ini semoga bisa digunakan untuk bahan pembelajaran bagi penulis untuk penelitian yang selanjutnya agar bisa menghasilkan sebuah penelitian ilmiah yang baik sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penelitian ini, penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi SIAK pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya. Pelaksanaan E-Government yang dimaksud adalah memanfaatkan sebuah perangkat lunak (*software*) yaitu melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang digunakan untuk memberikan (informasi mengenai berita yang akan di sajikan kepada masyarakat seperti laporan berita acara kegiatan publik, susunan pengaduan, pelayanan sumber penyajian dan pengelolaan data, serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah), untuk mempublikasikan sebuah kebijakan baru yang berhubungan dengan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui (website, liputan media massa, dan pusat informasi), Untuk menangani dan menampung seluruh pengaduan , hambatan dan masalah yang terjadi mengenai proses pembuatan administrasi kependudukan.

Elektronik pemerintahan atau biasa disebut E-Government memiliki banyak manfaat yang dirasakan baik oleh pihak instansi dan juga masyarakat

itu sendiri. Menurut data sementara yang peneliti dapat bahwasanya setelah di terapkannya kinerja administrasi kependudukan melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terdapat adanya sebuah efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kinerja Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil seperti halnya dalam penerbitan KK (Kartu Keluarga), E-KTP (KTP elektronik), dan surat-surat sipil lainnya. Dengan digunakannya sistem E-Government pada kinerja sebuah instansi pemerintah seperti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya proses kinerja karyawan dapat terlaksana lebih efektif dan efisien , dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholdernya, terutama dalam proses kerja yang tepat waktu dan hasil guna di berbagai bidang kehidupan bernegara, meningkatkan adanya keterbukaan kinerja pemerintah, pengendalian, dan pertanggung jawaban atas tugas dalam penyelenggaraan pemerintah dalam rangka penerapan konsep Good Corporate Governance, mengurangi secara signifikan keseluruhan biaya administrasi, peluang, dan hubungan sosial yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan kegiatan sehari-hari, serta mewujudkan sebuah suasana kehidupan masyarakat baru yang bisa secara cepat dan tepat menjawab berbagai problematika yang ada seiring perubahan waktu dan zaman yang semakin berkembang dan serba canggih.

Setelah dilihat besarnya manfaat yang di dapat dari pelaksanaan E-Government melalui aplikasi SIAK , disamping itu terdapat juga hambatan atau kendala yang membatasi kelancaran dalam pelaksanaan E-Government tersebut .Sosiawan (2011) dalam Asep Hidayat (2017: 40-41) menjelaskan ada beberapa faktor yang menghambat perkembangan sistem E-government , yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan pemerintah dan petunjuk pedoman mengenai penggunaan dan pemanfaatan E-Government sebenarnya telah ada tetapi dari masing-masing pihak Pemda belum memberikan keterangan dan kebijakan yang

jelas mengenai hal tersebut, jadi belum di tetapkannya standarisasi mengenai pengimplementasian dan sosialisasi penyelenggaraan E-Government.

2. Masih adanya keraguan pada pihak Pemda dan Pemkot dalam penerapan dan pelaksanaan E-Government dikarenakan masih minimnya Sumber Daya Manusia yang menunjang atau yang bergerak di bidang ahli dari segi skill manajerial dalam pengelolaan situs pemda.
3. kurangnya suprastruktur dan infrastruktur yang menunjang dikarenakan mahalnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Sehingga mengakibatkan kurang meratanya penetrasi pasar *hardware* dan *provider* juga layanan jasa pada masing-masing daerah.
4. Lemahnya ekonomi menjadikan banyaknya golongan masyarakat kurang mampu atau menengah kebawah hingga menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pengalaman yang menunjang, hal demikian mengakibatkan tidak meratanya pengetahuan masyarakat mengenai penggunaan dan pelaksanaan E-Government.

Dengan demikian untuk mengacu pada sebuah E-Government yang baik maka harus dilandaskannya sebuah prinsip dalam proses kinerja yang telah ditetapkan. Disini terdapat beberapa prinsip yang bisa di gunakan dalam proses kinerja elektronik pemerintah melalui aplikasi SIAK yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip Pertama, fokuslah pada perbaikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Semakin banyaknya pelayanan yang diberikan pemerintah terhadap masyarakat maka harus adanya evaluasi yang menjadikan pemerintah sebagai pelaksana dalam memberi pelayanan agar adanya suatu pelayanan yang harus di utamakan dan di fokuskan, dalam pelaksanaannya mana saja pelayanan yang harus lebih di utamakan, pelayanan yang harus lebih di utamakan, yaitu sebagai berikut :
 - 1) Memiliki daya transaksi berskala besar yang melibatkan banyak sekali sumber daya manusia dan memerlukan pelayanan yang ekstra dalam pelaksanaannya.

- 2) Membutuhkan transaksi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat yakni sebuah proses dimana adanya kepentingan ataupun kerjasama yang membutuhkan kejelasan dalam pelaksanaannya sehingga terjadinya timbal balik dalam transaksi.
 - 3) Adanya sebuah kerjasama dalam kepentingan antara pemerintah dengan stakeholder itu sendiri yaitu seperti lembaga swasta maupun lembaga non-komersial lainnya.
2. Prinsip Kedua, bentuklah suatu lingkungan yang kompetitif. Disini pemerintah harus bisa menciptakan sebuah lingkungan yang kompetitif dengan menerapkan sikap adil, obyektif, tidak diskriminasi, dan kondusif. Yang dimaksud lingkungan kompetitif disini yaitu bahwasanya tujuan dalam melayani masyarakat tidak harus dibebankan dan diserahkan segala hak dan kewajiban masyarakat terhadap pemerintah saja tetapi adanya kesempatan untuk pihak lembaga swasta dan lembaga non-komersial lain untuk dapat melakukannya. Bahkan dalam pelaksanaan dan pencapaiannya pemerintah bisa bersaing dengan pihak lembaga swasta dan lembaga non-komersial lainnya jika rencana tersebut mengarah pada pemberian yang terbaik terhadap masyarakat.
 3. Prinsip Ketiga, adanya sebuah reward yang diberikan terhadap sebuah prestasi dan inovasi, dan juga diberikan kesempatan untuk sebuah kesalahan yang akan terjadi. Sistem E-Government merupakan sebuah konsep yang masih baru dan membutuhkan pendekatan juga penerapan secara bertahap, dimana sebuah bangsa dan negara masih melakukan sebuah percobaan dan pembelajaran mengenai sistem E-Government tersebut. Hal demikian merupakan sebuah fenomena yang wajar juga normal jika dari sedemikian masih banyak proses program dalam portofolio.
 4. Prinsip Keempat : Memfokuskan pada titik efisiensi . Efisiensi merupakan sebuah hal yang bisa dinilai dari bagaimana besarnya manfaat dan daya gunanya terhadap pemasukan tambahan untuk pemerintah dari hasil implementasi sistem modern yang telah berjalan, bukan hanya dari

proses pelayanan yang di berikan semata dari hasil pemanfaatan internet dan teknologi digital yang menyebabkan banyak pengeluaran anggaran biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi penggunaan kanal digital dalam proses pelaksanaan pelayanan tidak harus menjadi jalan atau solusi alternatif dalam jalur konvensional maupun jalur tradisional yang biasa digunakan oleh kebanyakan masyarakat.

Indrajit (2011: 24) Setelah melihat poin-poin diatas maka Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya dalam penelitian ini bisa diukur dengan indikator Pelaksanaan E-Government yang telah di sebutkan yaitu sebagai berikut :

1. Data infrastruktur

Untuk menyediakan kualitas dan kuantitas data sebagai pendukung juga pelengkap dalam penerapan dan pelaksanaan E-Government di butuhkan manajemen sistem, dokumentasi dan proses kinerja.

2. Infrastruktur legal

Untuk terlaksananya penerapan dan pelaksanaan E-Government agar berjalan lancar maka diperlukannya prosedur perizinan yang dilakukan melalui hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.

3. Infrastruktur institusional

Dalam penerapan dan pelaksanaan E-Government di tujukan agar lembaga pemerintah lebih memfokuskan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, artinya tidak diperbolehkan untuk menangani persoalan yang lainnya sebelum persoalan pertama terselesaikan dengan baik.

4. Infrastruktur manusia

Dalam penerapan dan pelaksanaan E-Government sangat di perlukan sumber daya manusia yang berkualitas dan tenaga ahli pada bidangnya, karena hal demikian merupakan suatu item terpenting dalam manajemen kinerja agar proses kinerja berjalan dengan baik dan efektif.

5. Infrastruktur teknologi

Dalam penerapan dan pelaksanaan E-Government sangat di butuhkan sarana dan prasarana yang menunjang proses pelaksanaan kinerja khususnya di bidang infrastruktur teknologi, jika hal demikian terpenuhi maka proses kinerja akan berjalan dengan produktif.

6. Strategi pemikiran pemimpin

Pemikiran seorang pemimpin sangat mempengaruhi pada starategi ataupun visi misi yang akan di bawanya pada suatu organisasi yang ia pimpin , dengan demikian baik tidaknya , lancar tidak nya sebuah organisasi dapat ditentukan bagaimana seorang pimpinan membuat sebuah kebijakan dan strategi kerja.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat dibuat sebuah kerangka pemikiran, yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1 Bagan Kerangka Berfikir Penelitian

1.7 Proposisi

Kualitas Pelaksanaan E-Government Melalui Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya akan berjalan baik dan lancar jika dilaksanakan hal-hal demikian yaitu sebagai berikut : (1) Data Infrastruktur, (2) Infrastruktur Legal, (3)Infrastruktur Institusional, (4) Infrastruktur Manusia, (5) Infrastruktur Teknologi, (6) Strategi Pemikiran Pemimpin.

